

Dampak Negatif Terorisme Perdagangan

Mulai Diperlihatkan di AS

2018-06-27 16:34:09

<http://indonesian.cri.cn/20180627/b0e37c6e-b91c-6413-b429-9d684136e68c.html>

Meskipun Tiongkok, Uni Eropa dan Kanada berkali-kali mengeluarkan peringatan akan provokasi perang dagang oleh AS, dan menekankan bahwa perang dagang tidak mempunyai pemenang, namun penasehat-penasehat Gedung Putih selalu tidak peduli, sampai mereka dilukai oleh Buatan AS yang dibanggakan mereka.

Produsen Sepeda Motor Harley Davidson yang mempunyai sejarah seratus tahun lebih mengumumkan belakangan ini, sebagian produksi mereka akan dipindah ke luar AS agar menghindari pajak bea cukai belasan yang direkrut terhadap AS oleh Uni Eropa.

Belakangan ini, seluruh dunia dapat terasai kemarahan Presiden Donald Trump. Dia berturut-turut mengunggah twitter untuk mencela perusahaan ini.

Dilihat dari Trump, Harley adalah wakil unggul buatan AS, adalah juga pendukung dia. Gedung Putih menambahkan pajak bea cukai terhadap mitranya, dan mengurangi pajak terhadap perusahaan dalam negeri, tujuannya menjaga perusahaan AS seperti perusahaan Harley. Tapi kini pendukung menjadi pengkhianat, yang dilindungi menjadi yang melarikan diri.

Namun, Trump tidak mempunyai kualifikasi untuk mencela Harley, karena justru kebijakannya yakni proteksime perdagangan sepihak yang diambilnya memaksa perusahaan AS seperti Harley ke kesulitan. Produksi di luar AS adalah pilihan yang terpaksa diambil Harley.

Sebagai perusahaan perdana yang keluar dari AS, peristiwa Harley ini menandakan sinyak gagal kebijakan ekonomi dan perdagangan pemerintah Trump dan akan mendatangkan serangkaian reaksi susulan.

Kini, AS memberi tekanan ke mana-mana dengan penambahan pajak bea cukai sebagai terorisme perdagangan, telah menyebabkan dampak negatif terhadap investasi, lowongan kerja, pasar dan konsumsi.

Belakangan ini, Direktur Jenderal IMF dan tokoh-tokoh lain sekali lagi mengeluarkan suara yang perang dagang tidak ada pemenang. Sekarang, Harley keluar, Trump marah. Selanjutnya, pemerintah AS akan membayar demi kebijakannya karena akan menghadapi tindakan balasan dari Uni Eropa, Meksiko dan negara-negara lain.